

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) dan mahasiswa:

Nama : Nosta Junita Sari Zendrato
NPM : 20510077
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nias Barat

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S-1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama

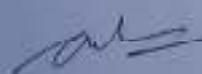


Melinda Stefani Harefa, S.E., M.Si



Dr. E. Harsohangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Vahry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak., CA

Ketua Program Studi



Dr. E. Manotig-Bertani Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak., CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). Namun dalam menyusun laporan keuangan perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku, agar terwujud laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan disusun dan disajikan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah maupun bagi publik. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan yang baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan referensi ketika akan mengambil suatu keputusan. Sistem informasi yang buruk dan tidak memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan tidak akan berguna dan pengguna akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan.

Menurut Pemandagri No. 59 Tahun 2007 mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Laporan keuangan menjadi faktor penting untuk

pemerintah yang wajib diperhatikan dalam penyajian laporan keuangannya dan menggambarkan sebuah media pemerintahan guna mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Aditya & Surjono dalam Rahayu & Kanita, 2023). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 standar normatif yang wajib diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya diperlukan laporan keuangan pemerintah daerah mampu melaksanakan kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Aspek yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam pemerintah itu sendiri. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sistem pengendalian internal yang tepat. Pengendalian Internal yaitu rencana dan metode organisasi yang dipakai untuk menjaga atau melindungi aset, menghasilkan informasi yang akurat dan andal meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi ketaatan. Pengendalian internal dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan kecurangan serta untuk melindungi dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap aset dan optimal perusahaan (Istikomaroh & Estiningrum, 2022:44). Dengan demikian pengendalian internal perlu dipelihara dengan baik, supaya kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir serta akan mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Sistem pengendalian internal di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.

60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses terintegrasi dimana pimpinan dan seluruh pegawai melakukan kegiatan terus-menerus yang memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, perlindungan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) oleh unit akuntansi pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu lembaga entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya (Erlina dalam Sinulingga et al., 2022). Kualitas laporan keuangan dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan review tahunan berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mengeluarkan empat jenis opini, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*)

Penelitian mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan Rohmah et al., (2020), Pratiwi & Wahyundara (2020), dan Darmawan & Darwanis (2018),

membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Wulandari & Rahmat (2020) membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Syahadatina dan Fitriyana (2016), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Triwahyuni (2016), menyatakan hasil penelitian bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat yang juga berkewajiban menyajikan laporan keuangan, memberi pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hal yang mencerminkan laporan keuangan daerah itu semakin bagus dapat dilihat dari opini audit atas laporan keuangan daerah untuk tahun tertentu. Menurut Rahayu & Kanita, (2023) kualitas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Putra & Halmawati, (2022) yang melakukan penelitian ini opini BPK merupakan pengukur kualitas laporan keuangan untuk daerah tertentu. Jadi semakin bagus kualitas laporan keuangannya maka opini audit yang tercipta adalah wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil Laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Barat dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Opini BPK Untuk LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2017-2022

No	Tahun	Kabupaten Nias Barat
1	2017	TMP
2	2018	TMP
3	2019	WDP
4	2020	WDP
5	2021	WTP
6	2022	WTP

Sumber: LHP LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2017-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 Pada Tahun 2017 dan 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ada memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Barat. Pada tahun 2019 dan 2020 di berikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),disini ada kenaikan opini yang sebelumnya Kabupaten Nias Barat mendapatkan TMP di tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2021 & 2022 telah mengalami kenaikan tingkat opini yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Perubahan opini dari hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari WDP menjadi WTP inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, serta faktor apa yang menjadi penyokong kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Nias barat opininya dari WDP menjadi WTP.

Dari hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Barat dari tahun 2017-2022 dapat dinilai bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerima predikat opini audit Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), belum tentu laporan keuangan instansi tersebut terhindar dari permasalahan dan kesalahan yang akan mengurangi nilai kualitas laporan keuangannya. Inti dari penelitian ini adalah menganalisis kualitas laporan keuangan daerah dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern yang diterapkan di Kabupaten Nias Barat.

Kabupaten Nias barat menaungi beberapa Dinas, Badan, dan Kantor Kecamatan. Semua Dinas, Badan dan Kantor Kecamatan ini merupakan Operasi Perangkat Daerah. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Jadi didalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah OPD yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor Kecamatan. Berdasarkan uraian tersebut, serta didukung oleh beberapa fakta-fakta yang ada, maka penulis meneliti lebih mendalam mengenai: **PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NIAS BARAT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nias Barat?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nias Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pengaruh sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adapun tujuan secara rinci dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nias Barat?
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nias Barat?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kualitas LKPD pada sektor publik dan pemerintahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara teknis di lapangan dan dapat memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah secara nyata.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi mengenai masalah yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kualitas LKPD Kabupaten Nias Barat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas LKPD Kabupaten Nias Barat.

4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas LKPD Kabupaten Nias Barat.

4.1.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bidang studi yang membahas mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Imran, (2023) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna. Laporan keuangan daerah adalah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mokoginta et al., 2017).

Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pengguna/pemakai laporan keuangan adalah (a) masyarakat; (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dana lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (d) Pemerintah. Salah satu jenis laporan keuangan adalah laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Menurut Erlina dalam Sinulingga et al., (2022) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) oleh unit akuntansi pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu lembaga entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Sedangkan menurut Mulyani dalam Nur et al., (2023) kualitas laporan keuangan ialah distribusi pelaporan keuangan harus memperlihatkan informasi yang akurat serta jujur. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Ikyarti & Aprilia, (2019) laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bias untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya.

Sesuai dengan yang di jelaskan pada BAB I salah satu hal yang mencerminkan laporan keuangan daerah itu kualitasnya semakin bagus adalah

dapat dilihat dari opini audit atas laporan keuangan daerah untuk tahun tertentu yang di keluarkan oleh BPK. Jadi hubungan antara kualitas dengan opini audit ini adalah dengan adanya Kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Semakin bagus kualitasnya maka semakin naik opininya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung didalamnya dapat digunakan oleh penggunanya dalam pengambilan keputusan. Jika keputusannya tepat berarti dikatakan berkualitas dan jika keputusannya buruk berarti tidak berkualitas.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

2.1.3 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan beberapa bentuk karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian tata cara mulai dari pendaftaran, pendataan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimaksudkan untuk menghasilkan informasi dalam berupa laporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan dalam Sinulingga et al., 2022). Menurut Pemandagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau

menggunakan aplikasi komputer. Akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dalam Mokoginta et al., 2017).

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Merupakan sistem yang meliputi proses mencatat, menggolongkan, menganalisis, pengukuran dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

2.1.5 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Terdapat indikator sistem akuntansi keuangan Berdasarkan Pemendagri No. 59 Tahun 2007 meliputi:

1. Pencatatan
 - a. Identifikasi serta mengukur gambaran dari lampiran suatu transaksi dan bukti dari kegiatan pencatatan yang telah dilakukan.
 - b. Buku harian yang dicatat berdasarkan dari bukti-bukti transaksi.
 - c. Kategori buku besar yang telah disusun berdasarkan jurnal.
2. Pengikhtisaran
 - a. Aktivitas yang berupa merancang neraca yang bersumber dari pencatatan ledger akhir dari suatu periode.

- b. Membuat konsep dari jurnal penyesuaian yaitu melakukan penyesuaian akun yang belum up to date berdasarkan informasi/keterangan yang terbaru.
- c. Menyusun neraca lajur adalah konsep dalam melakukan pembuatan dari suatu laporan keuangan.
- d. Membuat jurnal penutup merupakan rancangan dari gambaran prosedur yang kegiatannya melakukan posting ke akun-akun yang berhubungan yang akan merubah nominal menjadi nol.
- e. Menyusun neraca saldo yang terjadi setelah penutupan merupakan gambaran dari neraca memiliki suatu kelompok akun sebenarnya yang disusun apabila telah ditutup.
- f. Membuat konsep dari jurnal pembalik yaitu sangat diperlukan bila telah membuat penutupan neraca saldo.

3. Pelaporan

Setelah berakhir suatu proses, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan kegiatan pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaporan atas penyusunan laporan keuangan.

2.1.6 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Winartuti, (2021) Pada umumnya tujuan akuntansi pemerintahan adalah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang penting dan mendasar serta membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang

serba terbatas seperti modal, tenaga kerja, tanah dan bahan baku guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan akuntansi pemerintahan antara lain untuk:

- a. Menjaga aset Pemerintah Pusat/Daerah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat/Daerah secara keseluruhan.
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

2.1.7 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Mokoginta et al., (2017) Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset, dan disempurnakan oleh permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada OPD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada OPD.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan SKPD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan OPD.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5. Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2.1.8 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi dalam Mokoginta et al., (2017) pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Istikomah & Estiningrum, (2022) pengendalian internal yakni proses, kebijakan, dan prosedur dalam sistem manajemen untuk memastikan bahwa laporan keuangan dilaporkan dan disusun sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Sistem pengendalian manajemen adalah elemen yang digunakan untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk membuat rencana dan mengendalikan keputusan, mendorong perilaku, dan mengevaluasi kinerja. Sistem pengendalian manajemen adalah elemen yang saling terkait yang dapat memfasilitasi pemrosesan informasi untuk membantu manajer mengoordinasikan berbagai bagian dan terus mencapai tujuan organisasi (Sagara, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Tunggal dalam Priatna et al., (2023) sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) Keandalan pelaporan keuangan (b) fektifitas dan efesiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern dilaksanakan oleh suatu perusahaan oleh organisasi untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan kecurangan serta untuk melindungi dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap asset dan aktivitas perusahaan.

2.1.9 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Beberapa tujuan dari sistem pengendalian intern menurut para ahli (Istikomaroh & Estiningrum, 2022):

1. Pengendalian internal suatu sistem rencana dan prosedur yang dilaksanakan oleh manajemen serta dibuat dalam mencapai lima tujuan seperti:
 - a. Bisnis perlu melindungi aset mereka dari pemborosan, inefisiensi, dan penipuan.
 - b. Menyongsong karyawan untuk mentaati kebijakan perusahaan. Setiap orang dalam suatu organisasi (manajer dan karyawan) harus bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.

- c. Meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan tidak boleh menyia-nyiakan sumber dayanya. Perusahaan bekerja keras untuk meningkatkan penjualan dan tidak menyia-nyiakan keuntungan.
 - d. Pastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Catatan yang akurat itu penting. Tanpa manajemen yang tepat, catatan Anda tidak akan dapat diandalkan dan Anda tidak akan dapat menentukan bagian mana dari bisnis Anda yang menguntungkan dan area mana yang perlu ditingkatkan.
 - e. Mematuhi persyaratan hukum. Kegagalan untuk mematuhi hukum dapat mengakibatkan perusahaan didenda atau, dalam kasus yang ekstrim, mengirim manajer puncaknya ke penjara. Kontrol internal yang efektif membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menghindari masalah hukum.
2. Tujuan pengendalian internal dilihat dari definisinya sebagai berikut:
- a. Menjaga kekayaan organisasi.
 - b. Mengecek ketelitian dan keandalan.
 - c. Mendorong Efisiensi.
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.10 Indikator Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas.

2. Penilaian Risiko

Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif.

4. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin mengawasi, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, yang kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang penulis dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu :

1. Priatna et al., (2023) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Perkebunan Nusantara VIII Wilayah Panggalengan Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada PTPN VIII Wilayah Panggalengan Kabupaten Bandung.

2. Machmudiyanti & Afa, (2023) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Marbun & Mahyudin, (2023) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan kualitas Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Rahayu & Kanita, (2023) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di OPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.
5. Sinulingga et al., (2022) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan

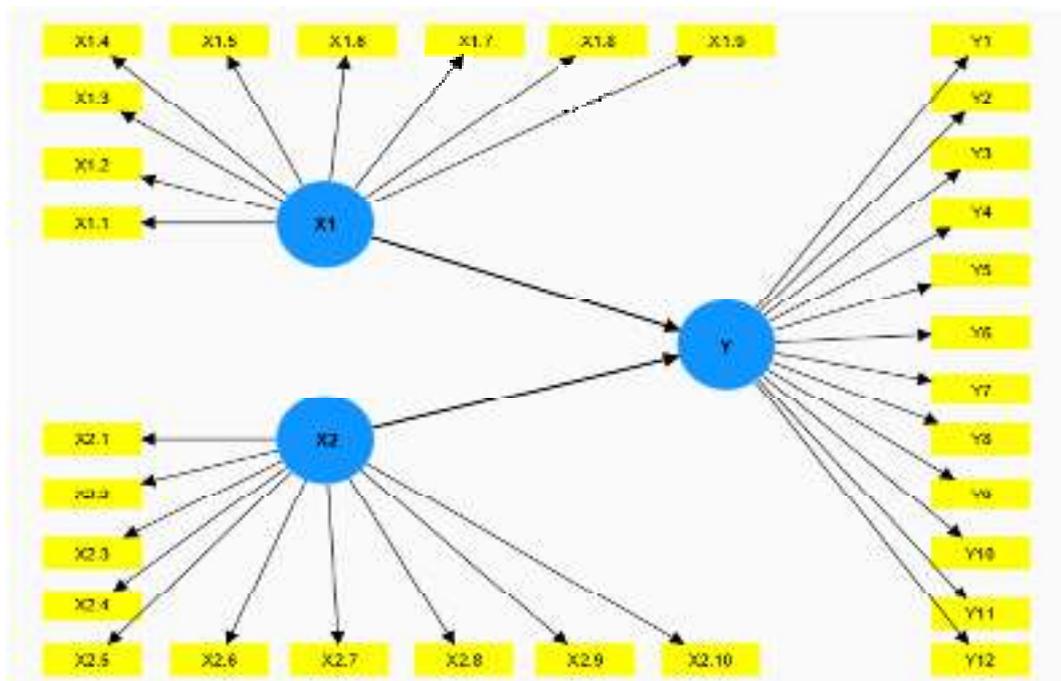
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

6. Putra & Halmawati, (2022) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas komite organisasi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
7. Imran, (2023) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah, Teknologi informasi dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Baubau.
8. Gustina, (2021) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

2.3 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel bebas yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan ulur hubungan antara variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Teoritis
Sumber: SEM PLS 2024

2.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, dan pengikhtisaran transaksi atau peristiwa keuangan dan laporan keuangan dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri N0. 59 Tahun 2007 yaitu meliputi, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja APBD harus disusun atau dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal yang dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan aplikasi komputer. Menurut Mahmudi dalam Sinulingga et al., (2022), sistem akuntansi pemerintah daerah disusun sedemikian rupa untuk memastikan bahwa siklus akuntansi dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan atau masalah karena jika terjadi masalah pada bagian dari siklus akuntansi, maka akan menyebabkan hasil keuangan yang berkualitas lebih rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmudiyanti & Aufa, (2023) yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Imran, (2023) yang berjudul “Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau”. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Baubau.

Maka dari itu, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang kurang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, pengambilan dan perencanaan strategis, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat serta menjaga kepatuhan terhadap hukum mampu meningkatkan Kualitas laporan keuangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian

penggelapan atau tipuan (Afriyanti dalam Aris Munaryadi & Heru Sulistiyo, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmudiyanti & Aufa, (2023) yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dalam hal ini sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Rahayu & Kanita, (2023) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)”. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan beberapa ulasan terkait jenis penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan variabel penelitian, pengujian model strukturan dengan menggunakan *Partial Least Square Structural Equation Modeling* (SEM-PLS) yang mana terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sitanggang & Togu Harlen LBN. Raja, (2011:28) metode penelitian kuantitatif yaitu sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada hal yang positif yang menggunakan populasi dan sampel tertentu serta teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian serta dalam menganalisis data dengan menggunakan alat analisis statistik yang akan menjawab dari sebuah hipotesa. Metode kuantitatif sangat banyak menggunakan angka-angka dan analisis statistik sehingga tingkat keilmiahannya telah terukur dan kevaliditasannya juga sudah teruji dari sebuah hasil penelitian yang sedang dilakukan dan begitu juga dengan rasionalitas serta sistematis dari metode kuantitatif.

Salah satu tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan deskriptif tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel bebas (variabel independen), sedangkan yang menjadi variabel terikat (variabel dependen) adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai akuntansi/keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Alasan penelitian ini dilakukan di OPD Pemerintah Kabupaten Nias Barat karena ingin memperoleh gambaran dan bukti empiris tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Sitanggang & Togu Harlen LBN. Raja, (2011:143) Populasi merupakan seluruh kesatuan objek atau subjek yang berguna dengan penelitian dan tentunya disesuaikan dengan akar permasalahan pada tempat melakukan penelitian atas permasalahan yang terjadi. Selanjutnya menurut Nanang Martono dalam Sitanggang & Togu Harlen LBN. Raja, (2011:145) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.

Untuk populasi dalam penelitian ini ditentukan dengan mempertimbangan unit yang akan dianalisis yaitu OPD yang ada di Kabupaten Nias Barat. Sesuai dengan penjelasan pada BAB I populasi ini diambil dari seluruh PD yang ada di Kabupaten Nias Barat. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Sesuai dengan judul yang perfokus pada kualitas laporan keuangan daerah maka, populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan, tanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan yaitu Pimpinan Setiap OPD (kepala Dinas, Pimpinan Badan dan Camat), di Kabupaten Nias Barat. Selain itu pihak-pihak atau pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dan tatausaha keuangan yang terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan yaitu bendahara dan pegawai/staf bagian akuntansi yaitu pembantu penatausahaan keuangan OPD di Kabupaten Nias Barat. Berikut ini adalah tabel 3.1 yang menyajikan jumlah OPD yang ada di Kabupaten Nias Barat.

Tabel 3.1 OPD Kabupaten Nias Barat

No	OPD
1	Kantor Sekretariat Daerah
2	Kantor Sekretariat DPRD
3	Kantor Inspektorat Daerah
4	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
5	Kantor Kecamatan Lahomi
6	Kantor Kecamatan Sirombu
7	Kantor Kecamatan Mandrehe Barat
8	Kantor Kecamatan Moro'o
9	Kantor Kecamatan Ulu Moro'o
10	Kantor Kecamatan Mandrehe
11	Kantor Kecamatan Mandrehe Utara
12	Kantor Kecamatan Lolofitu Moi
13	Kantor Dinas Pendidikan
14	Kantor Dinas Kesehatan
15	Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
17	Kantor Kantor Dinas Sosial
18	Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
19	Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
20	Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
21	Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Kantor Dinas Perhubungan
23	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika

24	Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
25	Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
26	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
30	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
31	Kantor Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM
32	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tabel 3.1 terdapat 33 OPD yang ada di Kabupaten Nias Barat. Oleh sebab itu jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 99 orang, dimana populasi ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Pimpinan OPD (Kepala Dinas, pimpinan Badan dan Camat), Bendahara dan pembantu bendahara yang ada di OPD Kabupaten Nias Barat

3.3.2 Sampel

Menurut Nanang Martono dalam Sitanggang & Togu Harlen LBN. Raja, (2011:148) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti atau dengan kata lain bahwa sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan *sampling Jenuh*. Sampel jenuh adalah teknik penarikan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sitanggang & Togu Harlen LBN. Raja, 2011:152). Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan OPD (Kepala Dinas, Pimpinan Badan,

dan Camat), bendahara, dan staf penatausahaan keuangan yaitu pembantu bendahara di seluruh OPD di Kabupaten Nias Barat yang berjumlah 99 orang. Dimana di Kabupaten Nias Barat terdapat 33 OPD yang masing-masing OPD ada 3 (tiga) orang responden.

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis dan Sumber Data

Secara sederhana data dapat diterjemahkan sebagai bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menjawab atas permasalahan yang sedang terjadi dilapangan atau fenomena yang ada (Sitanggang & Togu Harlen LBN. Raja, 2011:132). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pihak pertama baik dari individu maupun perorangan. Pada penelitian ini data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner oleh responden (Sugiyono, 2019:194).

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sitanggang & Togu Harlen LBN. Raja, (2011:135) adalah teknik atau metode serta cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan yang sedang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan kuisisioner terstruktur (daftar pertanyaan) yang diperlukan secara kuantitatif yang diberikan kepada responden, yang dapat membantu dalam mengumpulkan data yang akurat. Dalam penelitian ini kuisisioner diberikan kepada responden dengan menggunakan *link google form*.

Dalam penelitian ini, kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Setiap jawaban dari instrument skala likert akan mempunyai gradasi dari setuju sampai sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga 5. Berikut merupakan tabel pengukuran kuesioner dengan menggunakan skala likert:

Tabel 3.2. Skala Pengukuran

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dan variabel independen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), dan Sistem Pengendalian Intern (X_2). Berikut ini merupakan tabel defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Sistem Akuntansi Daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah	1. Pencatatan 2. Pengikhtisaran	Likert 5

Keuangan Daerah (X_1)	serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pemendagri No. 59 Tahun 2007)	3. Pelaporan	
Sistem Pengendalian Intern (X_2)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	Likert 5
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas Laporan Keuangan merupakan hasil identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) oleh unit akuntansi pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu lembaga entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya (Erlina dalam Sinulingga et al., 2022)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Likert 5

3.6 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis dengan PLS-SEM merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki data *non linier*. PLS-SEM merupakan suatu teknik analisis yang menggabungkan pendekatan struktural, pendekatan analisis faktor, dan analisis jalur (Harapha dalam Musyaffi et al., 2022). Analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model*.

3.6.1 Uji Instrumen Data

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. Uji Validitas

a. *Convergent Validity*

Convergent validity dapat dilihat dari nilai *loading factor* pada variabel endogen dan eksogen. Nilai yang direkomendasikan untuk *convergent validity* adalah $> 0,7$ pada model penelitian yang relatif sudah banyak diteliti. Jika model dalam penelitian merupakan model yang baru dikembangkan atau penelitian pertama, nilai *loading factor* dapat ditoleransi pada $> 0,5$ (Wati dalam Musyaffi et al., 2022).

b. *Discriminant Validity*

Discriminant validity merupakan nilai *cross loading factor* yang bertujuan untuk mengetahui terkait diskriminan yang ada dalam suatu konstruk penelitian. Cara

mengetahui memadainya suatu diskriminan dalam suatu konstruk dengan perbandingan yang menghasilkan angka lebih besar antara nilai *loading* konstruk yang lain (Musyaffi et al., 2022).

Tabel 3.4. Parameter Uji Validitas

Uji Validitas	Para Meter	Rule Of Thumbs
Konvergen	Faktor Loading	Lebih dari 0,7
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Lebih dari 0,5
	Communality	Lebih dari 0,5
Diskriminan	Akar AVE dan Korelasi Variabel laten	Akar AVE > Korelasi vareibel laten
	<i>Cross Loading</i>	Lebih dari 0,7 dalam satu variabel

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada PLS digunakan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*.

a. *Composite Reliability*

Composite reliability merupakan ukuran untuk mengukur reliabilitas suatu indikator. Dengan nilai tersebut dapat terukur nilai reabilitas sesungguhnya dari suatu konstruk yang dibangun. Nilai *composite reliability* diharapkan minimal > 0,7 (Sarstedt dalam Musyaffi et al., 2022:11). Niali *composite reliability* diatas > 0,8 maka dapat disimpulkan data yang ada memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (Wati dalam Musyaffi et al., 2022:11).

b. *Cronbach's Alpha*

Cronbach's alpha juga merupakan penilaian terhadap reliabilitas dari batas suatu konstruk. Nilai *cronbach's alpha* mengukur konsistensi internal dari suatu indikator dengan nilai minimal yang diharapkan adalah $> 0,7$ (Basbeth dalam Musyaffi et al., 2022:11). Sementara pendapat lain menjelaskan bahwa nilai minimal dari pengujian ini adalah $> 0,6$ untuk seluruh konstruk yang ada dalam penelitian (Wati dalam Musyaffi et al., 2022:11).

2. Model Struktural (*Inner Model*)

a. *R-Square*

R-Square pada PLS dilakukan untuk mendapatkan hasil kemampuan dari model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai satu pada koefisien, maka variabel bebas mampu menjelaskan seluruh informasi yang diperlukan dalam perhitungan variabel terikat. Adapun ketika mendekati nol, maka kemampuan variabel bebas tersebut sangat terbatas. Jika $0 < R^2 < 1$, maka variabel bebas memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi perubahan variabel terikat. Terdapat beberapa kriterianya :

1. Nilai R^2 sebesar 0,75 dikategorikan model substansial/kuat.
2. Nilai R^2 sebesar 0,50 dikategorikan model moderate/sedang.
3. Nilai R^2 sebesar 0,25 dikategorikan model lemah/buruk.

b. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada PLS digunakan untuk mengukur probabilitas sebuah data menggunakan menu *path coefficients*. *Rule of thumbs* terdukungnya suatu hipotesis penelitian adalah jika koefisien atau arah hubungan variabel (ditunjukkan oleh nilai

original sample) sejalan dengan yang dihipotesiskan, dan jika nilai *t-statistic* nilai $> 1,64$ (*two tailed*) atau $> 1,96$ (*one tailed*) dapat dikatakan signifikan dan *probability value* (P-Value) $< 0,05$ maka signifikan yang artinya variabel mediator memediasi pengaruh suatu variabel yang mempengaruhi terhadap suatu variabel yang di pengaruhi. Dengan kata lain pengaruhnya tidak langsung. Jika P-Value $> 0,05$ maka tidak signifikan yang artinya variabel mediator tidak memediasi pengaruh suatu variabel yang mempengaruhi terhadap suatu variabel yang dipengaruhi. Dengan kata lain pengaruhnya adalah langsung. Model regresi linear dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

a = Konstanta dari keputusan regresi

b_1 = Koefisien regresi variabel X_1 yaitu SAKD

x_1 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

b_2 = Koefisien regresi variabel X_2 yaitu SPI

x_2 = Sistem Pengendalian Intern (SPI)

e = error